

Masruhan Sayangkan Drama Buruk DPRD

▶ Sidang Paripurna Penetapan Plt Bupati Rembang Kembali Gagal

STORY HIGHLIGHTS

- Agenda pelantikan Bupati Rembang, Abdul Hafidz pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Rembang, Kamis (15/1), kembali gagal.
- Kejadian tersebut merupakan kali ketiga lantaran kehadiran anggota DPRD tidak memenuhi kuorum.

geruduk Komisi A DPRD Provinsi Jateng, Kamis petang. Mereka diterima oleh Ketua Komisi A DPRD Jateng, Masruhan.

Ketua Guru Pendawa, H. Zidan mengatakan, tidak terlaksananya paripurna tersebut selalu disebabkan hal yang sama. Fraksi Demokrat dan Fraksi Kebangkitan Bangsa dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sama sekali tidak hadir dalam paripurna sehingga tidak memenuhi kuorum.

Yang lebih mengecewakan mereka, sebelumnya sudah ada jaminan dari pimpinan fraksi untuk hadir dalam paripurna. Selain bersedia hadir, seluruh pimpinan fraksi berjanji akan menginstruksikan anggotanya agar datang ke paripurna.

"Namun kenyataannya Fraksi Demokrat, PKB dan PKS tidak hadir. Dari 45 anggota dewan, hanya 27 orang yang hadir," kata dia.

Kepada Masruhan ia

mengungkapkan kekecewaannya. Setelah tiga kali berturut-turut, Zidan tak tahu lagi ke mana harus mengadu. Ia tak habis pikir dengan intrik politik di Kabupaten Rembang.

"Intrik politiknya sangat kotor," sambungnya.

Anggota Guru Pendawa, Sunarto menambahkan, apa yang terjadi di Rembang mungkin adalah kali pertama di Indonesia. Di

mana tiga kali beruntun, sidang paripurna yang mengagendakan penetapan Abdul Hafidz selalu gagal. "Kami sungguh malu," keluhnya.

Sisi lain, kasus ini jadi pembelajaran masyarakat agar jangan memilih kembali wakil rakyat yang mangkir pada Pemilu depan.

Ketua Komisi A DPRD Jateng, Masruhan menyayangkan apa yang dilak-

kukan DPRD Rembang. Menurutnya, mereka telah mempertontonkan drama yang buruk. Mereka lebih mementingkan ego kelompoknya.

Ia menyarankan, agar kepala desa tersebut menemui Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah. (gap)

Moch Salim Gugat BPK dan Polda Jateng

KASUS korupsi APBD Rembang tahun 2006 yang menyeret Bupati Moch Salim telah selesai disidangkan di Pengadilan Tipikor Semarang.

Bahkan, upaya bandingnya pun gagal karena Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menguatkan putusan terhadapnya dengan dua tahun penjara.

Saat ini, Salim sedang melakukan upaya peninjauan kembali atas kasusnya tersebut. Namun, di tengah upaya PK, Bupati Rembang nonaktif itu juga melakukan upaya gugatan terhadap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait hasil auditnya.

"Kami menilai audit BPK itu salah.

Selain BPK, kami juga menggugat Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng yang memperkarakan kasus ini berdasarkan audit BPK itu. Gugatan kami masukan ke PN Semarang," kata kuasa hukum Moch Salim, Ahmad Hadi Prayitno, kemarin.

Atas perkara ini, lanjut Hadi, kliennya telah dirugikan secara material sebesar Rp 484 juta yang dihitung dari hilangnya pendapatannya sebagai Bupati. Serta kerugian immateriil atas kasus yang menjeratnya sebesar Rp 500 juta. J

"adi kami menggugat ganti rugi sebesar Rp 984 juta," tegasnya. (nal)

SEMARANG, TRIBUN - Paripurna DPRD Kabupaten Rembang untuk membahas agenda pelantikan Plt Bupati Rembang, Abdul Hafidz, Kamis (15/1), menjadi bupati definitif, kembali gagal. Ini berarti sudah kali ketiga paripurna sejenis gagal lantaran tidak memenuhi kuorum.

Mengeluhkan hal itu, 45 anggota Paguyuban Kepala Desa Kabupaten Rembang Guyub Rukun Petinggi Dampo Awang (Guru Pendawa) meng-